

PERAN DINAS SOSIAL DALAM REHABILITASI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR

Sondi Prilian¹, Sirodjul Munir², Asep Nurwanda³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: sondiprilian@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi karena peran Dinas Sosial Kota Banjar yang belum optimal dalam Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa yang menyebabkan adanya peningkatan kasus di Kota Banjar. Belum optimalnya karena terjadinya miss communication dalam hal penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang sedang mengamuk, keterbatasan sumber daya manusia yang ahli karena bukan dari pendidikan psikologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer dari wawancara pada 9 (sembilan) informan. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik Analisis Data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yaitu: Peran Dinas Sosial Kota Banjar dalam rehabilitasi belum terlaksana secara optimal, hal ini dapat diketahui bahwa dari 4 (empat) dimensi 2 (dua) diantaranya tidak terlaksana dengan optimal karena terdapatnya hambatan yang terjadi yaitu pola hubungan yang terjalin antara dinas pelaksana dengan masyarakat tidak merata, dan sosialisasi yang kurang. Upaya dilakukan evaluasi terhadap penambahan fasilitas sebagai media penyampaian pesan, melakukan pelayanan secara langsung dengan melakukan sosialisasi kembali.

Kata Kunci: *Peran, Rehabilitasi, dan Orang Dengan Gangguan Jiwa.*

PENDAHULUAN

Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sebagai istilah resmi bagi penyandang gangguan jiwa berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 tahun 2014 merupakan suatu permasalahan yang secara signifikan memberikan pengaruh pada tingkat atau capaian mengenai keberhasilan dari suatu pemerintahan dalam mengatasi permasalahan sosial di masyarakat. Orang dalam gangguan jiwa atau

ODGJ ini bukan suatu kondisi yang dapat dengan mudah untuk ditentukan penyebabnya dan ditangani dengan mudah, banyak sekali faktor yang saling berkaitan yang dapat menimbulkan gangguan jiwa pada seseorang.

Perlu adanya Rehabilitasi terhadap ODGJ agar mampu memulihkan dan memberikan hidup layak terhadap ODGJ. Upaya rehabilitasi ini pada tingkat daerah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota

Banjar. Tentunya dalam upaya rehabilitasi ODGJ ini secara signifikan harus terus dilakukan serta harus responsif terhadap segala permasalahan khususnya yang mengalami gangguan jiwa di Kecamatan Pataruman.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Banjar tahun 2020 mengenai Data Masalah Kejiwaan Kota Banjar menyebutkan bahwa pada 3 wilayah Puskesmas Pataruman dengan deskripsi pada wilayah 1 puskesmas Pataruman terdapat 31 orang, wilayah 2 puskesmas Pataruman sebanyak 33 orang dan pada wilayah 3 puskesmas Pataruman sebanyak 38 orang sehingga secara keseluruhan terdapat 102 orang yang termasuk pada masalah kejiwaan dengan diagnosa yang berbeda-beda.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menerangkan bahwa pemerintah memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi orang dengan kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa berdasarkan hak asasi manusia. Oleh karena itu, yang menjadi poin penting adalah untuk lebih mengoptimalkan peran dari Dinas Sosial Kota Banjar dalam Rehabilitasi ODGJ di Kecamatan Pataruman.

Karena banyaknya kasus gangguan jiwa, mendorong pemerintah untuk terus berupaya menangani permasalahan ODGJ ini dengan mengembangkan berbagai program dan pengoptimalan peran dari pihak yang terkait dengan pelayanan untuk Rehabilitasi ODGJ ini. Hal ini sebagai

upaya untuk mengurangi tingkat ODGJ dan dampak dari tidak adanya pemulihan atau rehabilitasi terhadap ODGJ.

Di Kecamatan Pataruman sendiri terkait dengan permasalahan sosial ODGJ tidak terlepas dari faktor biologis atau keturunan, penyalahgunaan obat, karena kegagalan dalam kehidupan, dan keterbelakangan mental saja. Sehingga peran dari Dinas Sosial Kota Banjar dalam merehabilitasi ODGJ belum terlaksana dengan optimal hal ini terjadi karena munculnya permasalahan dari adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia dari pegawai Dinas Sosial yang membidangi upaya rehabilitasi.

Dengan begitu, diperlukan adanya perbaikan dari segi pendidikan yang dimiliki oleh pegawai dari Dinas Sosial yang membidangi upaya rehabilitasi sesuai dengan program jurusannya. Karena dalam pelaksanaan perannya diperlukan adanya kreadibilitas untuk mendukung terselenggaranya peran dari pemerintahan yang optimal.

Adapun indikator-indikator masalah dalam penelitian ini berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya komunikasi yang terjalin antara Dinas Sosial sebagai pelaksana dengan penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa sebagai sasaran dari pelaksanaan rehabilitasi. Misalnya pada saat pihak keluarga akan menyerahkan anggota keluarganya yang menderita

sebagai Orang Dengan Gangguan Jiwa, mereka kesulitan akses komunikasi secara langsung dengan pihak Dinas Sosial jika penderita Orang dengan Gangguan Jiwa sedang mengamuk dan tidak bisa dikendalikan.

2. Terhambatnya hubungan yang terjalin antara Dinas Sosial sebagai pelaksana dengan keluarga penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa yang menjadi sasaran Rehabilitasi. Padahal pola hubungan yang terjalin antara Dinas Sosial dengan masyarakat harus terus terjalin agar lebih mempermudah pelaksanaan peran Dinas Sosial dalam melakukan upaya rehabilitasinya. Misalnya mengenai alur proses pendaftarannya hingga pelaksanaan rehabilitasinya yang akan dilakukan masyarakat cenderung kebingungan apakah harus ke Dinas Sosial ataukah harus ke Dinas Kesehatan.
3. Belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi oleh Dinas Sosial terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa karena kurangnya dukungan sumber daya manusia yang ahli dalam membidang rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa. Sehingga mendapatkan citra yang kurang dari masyarakat karena kurangnya tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banjar dalam Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa.

Berdasarkan latar belakang dan indikator-indikator masalah tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan

penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul “Peran Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kecamatan Pataruman Kota Banjar”.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Soekanto (2007:213), mengungkapkan bahwa “Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”.

Pengertian Peran juga dijelaskan menurut Merton (dalam Soekanto, 2007:67) bahwa “Peran adalah pola kepribadian orang-orang yang diharapkan menduduki jabatan terpilih dalam masyarakat”. Dalam pelaksanaan peran, pada hakikatnya sebagai upaya yang seharusnya terjadi setelah dibentuknya suatu lembaga ataupun organisasi sebagai pelaksanaan tugas dan fungsinya terhadap masyarakat.

Penjelasan lainnya dijelaskan menurut Rosady Ruslan (2020:56) yang menyebutkan bahwa terdapat empat peran utama *Public Relation*, diantaranya:

1. Sebagai *communicator* atau penghubung antara organisasi atau lembaga yang diwakili dengan publiknya. Adanya suatu kondisi dimana terdapatnya komunikasi yang terjalin antara publik internal dan komunikasi dengan publik eksternal.

Pelaksanaan peran sebagai *communicator* yaitu sebagai penyebar berita ataupun sebagai penyampai pesan dan menciptakan opini publik.

2. Membina *relationship*, yaitu berupaya membina hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan pihak publiknya.

Dalam membina suatu hubungan dalam pelaksanaan peran berkaitan dengan pola hubungan yang terjalin harmonis dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Maka dalam hal ini *publik relation* berperan dalam melakukan pendekatan hubungan yang baik antara publik internal ataupun dengan publik eksternal. Hal ini mengarah pada adanya upaya untuk menciptakan rasa saling mempercayai dan saling memperoleh manfaat antara lembaga/organisasi dengan publiknya sebagai target dari sasaran pelaksanaan suatu program.

3. Peranan sebagai pendukung dalam organisasi, yakni sebagai pendukung dalam fungsi manajemen organisasi. Peran yang mengarah pada pelaksanaan suatu fungsi manajemen dalam organisasi/lembaga yang didalamnya sebelum menentukan program yang akan dibuat diupayakan untuk menemukan fakta dari permasalahannya (*fact finding*), membuat perencanaan (*planning*), adanya komunikasi yang terjalin, dan dalam pelaksanaannya melakukan pengawasan dan

evaluasi/pemantauan secara berkelanjutan.

4. Membentuk *corporate image*, artinya suatu organisasi berupaya untuk menciptakan citra bagi organisasi atau lembaganya. Dimana dalam membentuk citra organisasi/lembaga merupakan tujuan akhir dari aktivitas program yang direncanakan.

Dapat disimpulkan juga bahwa dari banyaknya jenis-jenis peran yang telah dijelaskan oleh para ahli maka penulis menyimpulkan bahwa pada intinya peran yang dilaksanakan sebagai upaya untuk menjalankan tugas dari jabatannya. Jika jenis peran pemerintah tentunya yang diharapkan adalah adanya perubahan dari masyarakat kearah yang lebih baik.

Peran dilihat wujudnya dari tujuan dasarnya atau hasil akhirnya, terlepas dari cara mencapai tujuan atau hasil tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan adanya cara-cara tertentu dalam suatu peran yang mendapat sanksi dari masyarakat. Suatu cara menjadi penting dalam perwujudan peran, ketika cara itu bertentangan dengan aspek lain dari peran. Dengan demikian, seorang aktor bebas untuk menentukan cara-caranya sendiri selama tidak bertentangan dengan setiap aspek dari peran yang diharapkan darinya.

Dinas sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah. Dinas sosial adalah sebagaimana mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kecamatan. Pelaksanaan diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjar sebelumnya bernama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Orang dengan gangguan jiwa memiliki masalah pada pola pikir, kemauan, emosi dan tindakan (Maramis, 2010:114). Gangguan jiwa merupakan kumpulan dari keadaan-

keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik, maupun dengan mental (Yosep, 2009:92). Oleh karena itu dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Orang Gagal Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan suatu keadaan pada seseorang yang memiliki keterbatasan dalam kualitas kehidupan yang berhubungan dengan mental, pola fikir, emosi dan tindakan yang secara kesehatan dianggap tidak normal atau sakit secara mental.

METODE

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Ulber Silalahi (2010:27) yang menjelaskan bahwa: "Penelitian deskriptif menyajikan suatu gambaran yang terperinci tentang situasi khusus, setting social, atau hubungan". Sedangkan kualitatif menurut Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong Lexy. J, 2019:4) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian peneliti memilih sumber data primer yang menjadi informan yaitu sebanyak

9 orang informan untuk memberikan informasi mengenai Peran Dinas Sosial Kota Banjar dalam rehabilitasi ODGJ di Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Sedangkan yang menjadi teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan, selanjutnya dilakukan analisa dengan menggunakan teknik analisa yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa Dinas Sosial Kota Banjar yang berperan sebagai *communicator*, membina *relationship*, peranan sebagai pendukung dalam organisasi, dan membentuk *corporate image* secara keseluruhan belum dilaksanakan secara optimal, hal ini karna adanya hambatan yang mempengaruhi semua kegiatan menjadi tidak dilaksanakan, berdasarkan indikator pada dimensi yaitu sebagai berikut:

Peran sebagai *communicator* yang terdiri dari 3 (tiga) indikator dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan peran sebagai *communicator* belum terlaksana dengan optimal. Alasan belum optimalnya dimensi peran ini yaitu masih munculnya beberapa hambatan dalam pelaksanaan peran misalnya adanya keterbatasan jangkauan pesan yang di harapkan mampu sampai pada

masyarakat secara umum, belum optimalnya penggunaan media sebagai penyampai pesan, dan adanya hambatan karena keterbatasan jangkauan informasi karena tingkat pendidikan yang kurang sehingga masyarakat kurang memahami maksud dari informasi atau pesan yang disampaikan oleh Dinas Sosial Kota Banjar mengenai upaya rehabilitasi, alur rehabilitasi dan perannya dalam pelaksanaan rehabilitasi.

Peran sebagai *relationship* yang terdiri dari 3 (tiga) indikator dapat diketahui bahwa Dinas Sosial Kota Banjar dalam pelaksanaan peran sebagai *relationship* belum terlaksana dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari setiap indikator yang mengalami hambatan yaitu pada indikator hubungan yang terjalin antara pihak pelaksana dengan sasaran pelaksana tidak terlaksana dengan baik karena Dinas Sosial Kota Banjar terbatas dalam hal komunikasi antara dinas sosial dan masyarakat dalam melakukan kontrol sosial pada pasien ODGJ sebelum adanya ketentuan mengenai pasien akan di rehabilitasi. Kemudian pada indikator pengaruh dari adanya hubungan antara pihak pelaksana dengan sasaran kegiatan masih belum terlaksana dengan baik sehingga menjadi hambatan dalam pelaksanaan suatu program rehabilitasi ODGJ yaitu keluarga pasien menjadi acuh terhadap respon dinas terhadap pasien ODGJ dan lebih memilih untuk mengobatinya secara mandiri ataupun lebih memilih memasungnya. Oleh

karena itu, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Banjar dalam melaksanakan dimensi *relationship* belum terlaksana dengan optimal.

Peranan sebagai pendukung dalam organisasi, yang terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu indikator Dinas pelaksana melaksanakan peranannya sesuai dengan standar operasional prosedurnya, pada indikator kesiapan secara responsif dari dinas pelaksana dalam melaksanakan tugasnya Dinas Sosial Kota Banjar dalam menanggapi aduan dari masyarakat dengan melakukan koordinasi dengan puskesmas untuk sebelumnya mengecek kondisi dari ODGJ tersebut, pada indikator dampak dari adanya tindakan yang dilakukan oleh dinas pelaksana memberikan hasil yang positif atau dengan kata lain Dinas Sosial Kota Banjar terus mengupayakan agar peranannya mampu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja yang diberikannya. Dari ketiga indikator tersebut peranan sebagai pendukung dalam organisasi sudah terlaksana dengan baik, dimana pada setiap indikator tidak terdapat hambatan yang terjadi.

Peran dalam membentuk *corporate image* sudah terlaksana dengan baik. Pada dimensi ini terdapat tiga indikator yang menjadi pendukung terlaksananya peran dari Dinas Sosial dalam rehabilitasi ODGJ yaitu indikator dinas pelaksana mampu memberikan image yang positif kepada sasaran kegiatan dengan begitu rasa

percaya kepada Dinas Sosial Kota Banjar mampu terbentuk atau dengan kata lain masyarakat akan secara terbuka dengan peran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Banjar, indikator dinas pelaksana menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan yang optimal, dan indikator pelaksanaan kegiatan oleh dinas diterima oleh masyarakat secara positif. Dari ketiga indikator tersebut sudah terlaksana dengan baik dan pada setiap indikator tidak terdapat hambatan yang terjadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Sosial Kota Banjar dalam rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa secara keseluruhan sudah terlaksana dengan baik namun belum terlaksana secara optimal. Berdasarkan dimensi dari peran yang terdiri dari 4 (empat) dimensi yaitu dimensi peran sebagai *communicator*, peran sebagai *relationship*, peranan sebagai pendukung dalam organisasi dan peran dalam membentuk *corporate image* berdasarkan hasil penelitian bahwa 2 (dua) diantaranya belum terlaksana dengan optimal yaitu pada dimensi peran sebagai *communicator* dan peran sebagai *relationship*. Hal ini karena masih adanya temuan-temuan di lapangan yang belum dilaksanakan dengan maksimal seperti pesan yang belum tersampaikan secara merata, keterbatasan penyampaian informasi

mengenai alur rehabilitasi kepada masyarakat, keterbatasan dalam pengoptimalan media penyampai pesan yang belum beralih pada penggunaan media online dan belum adanya wadah atau panti rehabilitasi dibawah naungan pemerintah Kota Banjar untuk menampung ODGJ guna membinanya. Adanya keterbatasan tersebut terkait dengan pola hubungan yang terjalin antara dinas pelaksana dengan sasaran pelaksana belum terlaksana dengan optimal dan tidak merata, sehingga masih terdapat penyandang ataupun masyarakat yang belum tersentuh penyuluhan/sosialisasi mengenai ketentuan persyaratan rehabilitasi.

Oleh karena itu, sebagai upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan melakukan evaluasi terhadap penambahan fasilitas sebagai media penyampaian pesan, melakukan pelayanan secara langsung dengan melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat apabila pandemi sudah berakhir, kemudian melakukan evaluasi terhadap anggaran pengadaan rumah singgah untuk Orang Dengan gangguan Jiwa yang akan di rehabilitasi sebelum di antarkan ke panti rehabilitasi. Serta hendaknya Dinas Sosial Kota Banjar tetap melakukan koordinasi dengan dinas lainnya serta instansi/lembaga

lainnya yang mendukung pada terlaksananya rehabilitasi serta untuk meminimalisir adanya penyimpangan dan temuan-temuan dilapangan yang dapat menghambat keberhasilan program rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Maramiss, Rusdi. 2010. Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDG III). Jakarta: FK UNIKA Atmajaya
- Moloeng, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar.
- Rosady, Ruslan. 2020. *Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Soerjono, Soekanto. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
- Yosep, Iyus, 2009. *Keperawatan Jiwa*. Cetakan Kedua. Bandung: Refika Aditama.